



Tinjauan Literatur Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Website di Desa: Peluang, Tantangan, dan Rekomendasi

Agustinus Kadja^{1*}, Yunardi Kristian Zega²

^{1,2}Teknik Komputer dan Jaringan, Politeknik Negeri Kupang

*E-mail korespondensi: gustiprabu927@gmail.com

Abstrak

Pelayanan publik di tingkat desa di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan birokrasi, kurangnya transparansi, dan rendahnya kualitas pengelolaan data. Digitalisasi melalui sistem informasi berbasis website hadir sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas layanan, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan menelaah berbagai studi terdahulu yang dipublikasikan antara tahun 2015–2025, baik nasional maupun internasional, terkait implementasi website desa dalam pelayanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan website desa memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi layanan administrasi, transparansi keuangan, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Namun, sejumlah tantangan juga muncul, meliputi keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, keterbatasan anggaran, serta isu keberlanjutan dan keamanan data. Berdasarkan sintesis literatur, rekomendasi strategis yang diajukan mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan regulasi, kolaborasi multipihak, serta pengembangan model keberlanjutan yang sejalan dengan konsep *Smart Village*. Kajian ini menegaskan bahwa sistem informasi pelayanan publik berbasis website tidak hanya merupakan instrumen teknis digitalisasi, tetapi juga strategi penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *e-government*; pelayanan publik; sistem informasi; tata kelola desa; transparansi

Abstract

Public services at the village level in Indonesia still face various challenges, such as bureaucratic delays, lack of transparency, and poor data management. Digitalization through web-based information systems has emerged as a potential solution to improve service quality, accountability, and community participation. This study employs a literature review method by analyzing research published between 2015 and 2025, both national and international, related to the implementation of village websites in public service delivery. The findings indicate that village websites offer significant opportunities to enhance administrative efficiency, financial transparency, and citizen engagement in local development. However, several challenges remain, including limited internet infrastructure, low digital literacy among village officials and residents, budget constraints, as well as issues of sustainability and data security. Based on the synthesis of the literature, strategic recommendations are proposed, including capacity building for human resources, stronger regulatory support, multi-stakeholder collaboration, and the development of sustainability models aligned with the Smart Village concept. This study highlights that web-based public service information systems are not merely technical tools for digitalization, but also a strategic means to achieve transparent, participatory, and sustainable village governance.

Keywords: *e-government*; public service; transparency; village governance; web-based information system



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, serta memperoleh layanan publik. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dituntut untuk mampu mengadopsi teknologi digital guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pada konteks pemerintahan desa, digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak, mengingat desa merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Sutanta, 2019).

Namun, pelayanan publik di banyak desa di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan klasik, seperti keterlambatan birokrasi, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya kualitas data administrasi (Fitriani & Saputra, 2020). Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya inovasi pelayanan publik melalui penerapan sistem informasi desa berbasis website. Kehadiran website desa tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, melainkan juga sebagai sarana pengelolaan data, layanan administrasi online, transparansi anggaran, serta komunikasi interaktif antara pemerintah desa dan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi website desa dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ramadhan & Nugroho (2021) menemukan bahwa pemanfaatan website dalam pelayanan publik desa mendorong keterbukaan informasi anggaran dan partisipasi masyarakat. Puspitasari (2022) menekankan bahwa website desa mampu mempercepat layanan administrasi, seperti pengurusan surat keterangan domisili, izin usaha, maupun pelayanan kependudukan. Di sisi lain, penelitian oleh Nurdin (2021) menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama adalah keterbatasan literasi digital aparat desa dan masyarakat, yang menghambat optimalisasi pemanfaatan sistem informasi berbasis website.

Meski demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada studi kasus implementasi di desa tertentu atau evaluasi teknis terhadap sistem informasi desa. Belum banyak kajian literatur komprehensif yang membahas peta peluang, hambatan, serta rekomendasi strategis pengembangan website desa dalam konteks pelayanan publik di Indonesia. Oleh karena itu, kajian pustaka ini menjadi penting untuk memberikan gambaran

menyeluruh mengenai tren, tantangan, dan arah pengembangan sistem informasi desa berbasis website.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan Indonesia untuk mendorong transformasi digital desa melalui program *Smart Village* dan *e-Government*. Website desa dapat menjadi sarana strategis untuk mendukung visi pembangunan desa digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjembatani kesenjangan informasi antara desa dan kota. Tanpa strategi yang tepat, digitalisasi desa justru berpotensi menghadirkan kesenjangan baru, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet dan literasi digital (Setiawan, 2020).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah pendekatan *literature review* yang memetakan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai sistem informasi pelayanan publik desa berbasis website, sekaligus mengintegrasikan temuan-temuan tersebut untuk menghasilkan analisis yang komprehensif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menekankan aspek praktis atau teknis di desa tertentu, penelitian ini lebih menyoroti kerangka konseptual, peta peluang, hambatan, serta rekomendasi strategis untuk pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis website di desa secara lebih luas.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis literatur terkait implementasi sistem informasi pelayanan publik desa berbasis website. 2) Mengidentifikasi peluang dan manfaat yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan website desa. 3) Mengkaji tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem informasi berbasis website di desa. 4) Merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan sistem informasi pelayanan publik desa berbasis website dalam mendukung transformasi digital pemerintahan desa di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*literature review*) dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk meninjau, membandingkan, dan menyintesis hasil-hasil penelitian terdahulu terkait penerapan sistem informasi pelayanan publik desa berbasis website. Menurut Snyder (2019), kajian literatur memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tren,

model konseptual, serta kesenjangan penelitian yang ada pada suatu topik tertentu.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2025 dengan penelusuran literatur yang dilakukan secara daring melalui berbagai basis data, antara lain Google Scholar, DOAJ, Garuda (Garba Rujukan Digital), ProQuest, dan ScienceDirect. Penelusuran literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci “sistem informasi desa”, “website desa”, “pelayanan publik berbasis website”, “e-government desa”, dan “smart village”. Dari hasil pencarian, dipilih literatur yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu artikel yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2025, berhubungan langsung dengan sistem informasi desa dan pelayanan publik berbasis website, dapat diakses secara penuh (*full text*), serta ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Artikel yang hanya berupa opini tanpa landasan penelitian atau tidak relevan dengan topik kajian dikeluarkan dari analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai sumber tertulis berupa artikel jurnal, buku, prosiding seminar, maupun dokumen resmi pemerintah. Data yang diperoleh dari literatur kemudian diorganisasi dengan menggunakan lembar telaah literatur. Lembar ini berfungsi untuk mencatat identitas artikel, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian, serta relevansinya terhadap fokus kajian. Langkah ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Fink (2014), bahwa telaah literatur yang sistematis membutuhkan prosedur seleksi, pencatatan, dan pengorganisasian data agar hasil penelitian lebih terarah dan valid.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyaring literatur yang relevan dengan topik. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, literatur yang sudah terpilih dikelompokkan ke dalam tema-tema utama, seperti peluang, tantangan, dan rekomendasi strategis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menyusun interpretasi berdasarkan sintesis literatur untuk menjawab tujuan penelitian.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan analisis yang komprehensif dan integratif mengenai sistem informasi pelayanan publik desa berbasis website, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan desa digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Desa Berbasis Website

Implementasi sistem informasi pelayanan publik berbasis website di desa merupakan salah satu bentuk transformasi digital yang mulai berkembang seiring dengan agenda pemerintah untuk mendorong *e-Government* dan *Smart Village*. Desa, sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, akuntabel, dan transparan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola sumber daya dan pemerintahan secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, desa sering menghadapi kendala dalam penyediaan layanan publik yang efektif karena keterbatasan sumber daya manusia, birokrasi yang panjang, dan akses informasi yang terbatas (Fitriani & Saputra, 2020).

Website desa kemudian hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut. Sutanta (2019) menyatakan bahwa pengembangan sistem informasi desa melalui website berpotensi memperkuat transparansi keuangan, mempercepat proses pelayanan administrasi, serta meningkatkan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ramadhan & Nugroho (2021) yang menunjukkan bahwa website desa dapat meningkatkan keterbukaan informasi, khususnya dalam penyampaian laporan keuangan, rencana pembangunan desa, serta penggunaan dana desa.

Dari perspektif implementasi teknis, website desa umumnya menyediakan berbagai fitur seperti informasi profil desa, data penduduk, layanan surat menyurat, laporan realisasi anggaran, serta berita kegiatan desa. Beberapa desa juga telah mengembangkan fitur interaktif, seperti layanan pengaduan masyarakat dan forum diskusi online (Puspitasari, 2022). Kehadiran fitur-fitur tersebut membuktikan bahwa website desa tidak hanya sekadar sarana informasi, melainkan juga alat manajemen pemerintahan yang modern.

Selain itu, implementasi website desa juga mendukung upaya digitalisasi pemerintahan yang lebih luas. Setiawan (2020) menegaskan bahwa website desa merupakan pintu masuk menuju digitalisasi desa karena dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain, misalnya Sistem Informasi Desa (SID), aplikasi kependudukan, maupun basis data nasional. Dengan integrasi ini, desa memiliki peluang untuk meningkatkan akurasi data, memperkuat perencanaan pembangunan, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi website desa sangat bervariasi antarwilayah. Beberapa desa di wilayah perkotaan dengan akses internet memadai dan sumber daya manusia terampil mampu memanfaatkan website desa secara optimal. Website mereka aktif diperbarui, informatif, dan benar-benar digunakan oleh masyarakat. Sebaliknya, di banyak desa terpencil, website desa hanya ada sebagai formalitas administratif tanpa pemutakhiran informasi secara berkala. Nurdin (2021) menemukan bahwa salah satu penyebab utama rendahnya pemanfaatan website desa adalah keterbatasan literasi digital aparat desa dan masyarakat. Faktor lain yang memengaruhi adalah ketersediaan infrastruktur internet, anggaran operasional, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Hal lain yang juga menarik adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat memengaruhi keberhasilan implementasi website desa. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat merasa dilibatkan dan mendapatkan manfaat langsung dari website desa, tingkat penggunaan dan keberlanjutannya lebih tinggi. Namun, ketika website hanya dikelola oleh perangkat desa tanpa melibatkan masyarakat, maka keberadaannya cenderung stagnan dan kurang relevan bagi kebutuhan warga (Sari, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi pelayanan publik desa berbasis website di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun belum merata. Implementasi yang berhasil umumnya ditandai oleh dukungan infrastruktur yang baik, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, adanya kebijakan yang mendukung, serta partisipasi aktif masyarakat. Sebaliknya, desa yang menghadapi keterbatasan pada faktor-faktor tersebut cenderung memiliki website desa yang tidak optimal. Oleh karena itu, implementasi website desa perlu dilihat bukan hanya dari aspek teknis, tetapi juga sosial, budaya, dan kebijakan yang menyertainya.

Peluang dan Manfaat Sistem Informasi Desa Berbasis Website

Pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik desa berbasis website memberikan berbagai peluang strategis yang dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa manfaat utama yang diidentifikasi dari hasil kajian literatur meliputi aspek transparansi, efisiensi, partisipasi masyarakat, serta dukungan terhadap transformasi digital desa.

Pertama, website desa berperan sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui website, informasi publik seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan pertanggungjawaban, dan kegiatan pembangunan desa dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan pemerintahan (Mardiasmo, 2018). Dengan keterbukaan informasi, potensi terjadinya penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir karena masyarakat memiliki akses langsung untuk mengawasi.

Kedua, penerapan sistem informasi berbasis website mendorong efisiensi pelayanan administrasi publik. Layanan yang sebelumnya membutuhkan waktu lama, seperti pengajuan surat keterangan domisili, surat izin usaha, atau pencatatan data kependudukan, dapat dilakukan lebih cepat melalui platform digital. Penelitian Astuti & Nugroho (2020) menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik berkontribusi dalam mengurangi beban birokrasi serta memperpendek rantai pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih efektif dan efisien tanpa harus selalu datang ke kantor desa.

Ketiga, sistem informasi desa berbasis website membuka peluang besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Fitur interaktif seperti forum diskusi, pengaduan online, dan kanal aspirasi memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam era digital dipandang sebagai bentuk *civic engagement* yang mendorong demokratisasi di tingkat lokal (Susanto, 2019). Dengan keterlibatan tersebut, keputusan pembangunan desa akan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, pengembangan website desa juga mendukung transformasi digital menuju desa cerdas (*smart village*). Website desa bukan hanya sekadar media informasi, melainkan juga dapat diintegrasikan dengan layanan publik lain seperti aplikasi kesehatan, pendidikan, atau ekonomi digital. Hal ini memperkuat visi pemerintah dalam mengembangkan *e-Government* yang inklusif hingga ke tingkat desa (Kementerian Kominfo RI, 2021). Dengan demikian, website desa dapat menjadi pintu masuk bagi desa untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi global.

Dengan berbagai peluang dan manfaat tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa sistem informasi pelayanan publik desa berbasis website memiliki peran strategis dalam

mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa. Namun, untuk memaksimalkan manfaat ini diperlukan dukungan kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat.

Tantangan dan Hambatan Implementasi Sistem Informasi Desa Berbasis Website

Meskipun penerapan sistem informasi pelayanan publik desa berbasis website memiliki peluang dan manfaat besar, hasil kajian menunjukkan adanya sejumlah tantangan dan hambatan yang dapat menghambat efektivitas implementasinya. Hambatan ini dapat dikelompokkan ke dalam aspek teknologi, sumber daya manusia, infrastruktur, budaya masyarakat, serta regulasi dan kebijakan.

Pertama, Keterbatasan Infrastruktur Teknologi. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi di desa. Beberapa desa masih menghadapi kondisi jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan belum terjangkau oleh layanan internet berkualitas. Menurut penelitian Prasetyo (2020), kesenjangan digital (*digital divide*) antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan besar dalam upaya pemerataan pelayanan publik berbasis digital. Kondisi ini membuat website desa sulit diakses oleh masyarakat secara optimal.

Kedua, Rendahnya Kapasitas dan Literasi Digital Aparatur Desa. Hambatan berikutnya adalah rendahnya kompetensi teknologi aparatur desa dalam mengelola website. Banyak perangkat desa belum memiliki keterampilan memadai dalam pengelolaan data digital, pengoperasian sistem, maupun pemeliharaan keamanan informasi. Hasil kajian literatur menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi teknologi di pemerintahan lokal sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (Widodo, 2019). Jika tidak ada pelatihan berkelanjutan, maka website desa hanya akan berfungsi sebagai formalitas tanpa memberi manfaat nyata.

Ketiga, Partisipasi Masyarakat yang Masih Rendah. Selain dari sisi aparatur, partisipasi masyarakat desa juga menjadi tantangan. Rendahnya tingkat literasi digital masyarakat menyebabkan website desa kurang dimanfaatkan. Sebagian besar warga masih terbiasa dengan pola pelayanan tatap muka dibandingkan mengakses layanan secara daring. Hal ini sesuai dengan penelitian Ningsih & Fajri (2021) yang menunjukkan bahwa adopsi

layanan digital di pedesaan sering terkendala oleh resistensi budaya dan kebiasaan masyarakat.

Keempat, Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Kebijakan. Hambatan lain adalah keterbatasan anggaran desa untuk pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan sistem informasi. Website desa membutuhkan biaya operasional rutin, termasuk server, domain, serta tenaga teknis yang kompeten. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, website desa akan sulit berkembang. Selain itu, regulasi mengenai standardisasi website desa masih belum merata sehingga setiap desa berjalan dengan model dan kualitas yang berbeda (Kemendagri, 2021).

Kelima, Keamanan Data dan Keberlanjutan Sistem Tantangan yang tidak kalah penting adalah aspek keamanan data. Website desa menyimpan data sensitif terkait kependudukan dan administrasi publik yang rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik. Menurut Susilo (2020), lemahnya keamanan siber di tingkat desa dapat menimbulkan risiko kebocoran data pribadi masyarakat. Selain itu, keberlanjutan sistem sering bergantung pada satu atau dua individu yang menguasai teknologi. Jika terjadi pergantian aparatur, sering kali keberlanjutan website terabaikan.

Berdasarkan tantangan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi sistem informasi desa berbasis website tidak hanya bergantung pada teknologi semata, tetapi juga menyangkut manajemen perubahan, literasi digital, dan kebijakan yang mendukung. Pendekatan yang diperlukan adalah holistik, mencakup: 1) Penguatan infrastruktur digital melalui kolaborasi dengan penyedia layanan internet. 2) Pelatihan literasi digital bagi aparatur desa dan masyarakat. 3) Penganggaran khusus untuk pengembangan dan pemeliharaan website desa. 4) Standardisasi kebijakan agar implementasi website desa memiliki kualitas yang merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tantangan yang ada bukanlah hambatan absolut, melainkan dapat diatasi melalui strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat sebagai pengguna akhir.

Rekomendasi Strategis untuk Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Desa Berbasis Website

Berdasarkan hasil kajian literatur mengenai implementasi, peluang, serta tantangan pengembangan sistem informasi desa berbasis website, diperlukan strategi yang komprehensif agar penerapannya tidak hanya sebatas proyek formalitas, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik desa. Strategi pengembangan harus memperhatikan aspek sumber daya manusia, kebijakan, infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan program.

Pertama, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Salah satu faktor kunci keberhasilan website desa adalah kapasitas aparat desa dan masyarakat dalam mengelola serta memanfaatkan teknologi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi penyebab utama tidak optimalnya pemanfaatan website desa (Sutanta, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan program pelatihan yang berkelanjutan bagi perangkat desa, baik dalam hal manajemen konten, administrasi layanan digital, maupun keamanan data. Hal ini sejalan dengan konsep *capacity building* yang menekankan pada peningkatan kompetensi aparatur publik dalam menjalankan pelayanan berbasis teknologi (Dwiyanto, 2018).

Kedua, Dukungan Regulasi dan Kebijakan. Pengembangan website desa juga membutuhkan payung hukum yang jelas agar memiliki legitimasi dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Pemerintah pusat maupun daerah perlu menetapkan regulasi yang mendorong desa untuk mengembangkan sistem informasi secara mandiri, misalnya melalui integrasi dengan program *e-Government* dan *Smart Village*. Seperti dikemukakan oleh Indrajit (2016), regulasi dan kebijakan yang jelas akan menjadi pendorong utama dalam penerapan sistem informasi di sektor publik karena dapat memastikan alokasi anggaran, standar pelayanan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Ketiga, Kolaborasi Multipihak. Keberhasilan website desa tidak bisa hanya ditanggung oleh pemerintah desa. Diperlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan masyarakat, lembaga pendidikan, pihak swasta, dan pemerintah daerah. Masyarakat berperan sebagai pengguna aktif sekaligus pengawas keberlangsungan layanan, lembaga pendidikan dapat menjadi mitra pendamping teknis, sementara sektor swasta dapat membantu dari sisi penyediaan infrastruktur maupun dukungan teknologi. Kolaborasi semacam ini sesuai dengan

teori *governance* yang menekankan pentingnya jaringan kerja sama antar aktor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif (Rhodes, 1996).

Keempat, Model Keberlanjutan (*Sustainability Model*). Salah satu masalah utama dalam implementasi website desa adalah ketidakberlanjutan pengelolaan. Banyak website desa yang hanya aktif pada awal pembangunan, namun kemudian tidak diperbarui karena keterbatasan sumber daya dan komitmen (Ramli, 2020). Oleh karena itu, perlu dirumuskan model keberlanjutan yang mencakup: 1) Alokasi anggaran khusus untuk pengembangan website desa. 2) Penunjukan tim pengelola dengan tanggung jawab yang jelas. 3) Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja website. 4) Integrasi layanan digital dengan kebutuhan nyata masyarakat desa (misalnya pengurusan surat online, informasi bantuan sosial, atau sistem informasi pertanian). Dengan penerapan strategi ini, website desa diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam pelayanan publik, pusat informasi, serta media partisipasi masyarakat.

Kelima, Sinergi dengan Konsep Smart Village. Website desa juga perlu dikembangkan sejalan dengan konsep *Smart Village*, yaitu desa yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Nugroho & Suyatno, 2021). Dengan demikian, pengembangan website desa bukan hanya sekadar menghadirkan informasi statis, melainkan menjadi bagian dari transformasi digital desa yang menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini masih terbatas pada kajian literatur sehingga disarankan penelitian selanjutnya dilakukan secara empiris melalui studi kasus atau survei di desa yang telah mengimplementasikan sistem informasi pelayanan publik berbasis website. Penelitian lanjutan dapat menggunakan metode *mixed methods* untuk mengukur efektivitas sistem terhadap kualitas pelayanan, transparansi, serta kepuasan masyarakat, sekaligus menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Selain itu, integrasi teknologi baru seperti aplikasi mobile, *cloud computing*, dan kecerdasan buatan (AI) juga penting diteliti, termasuk aspek sosial dan budaya yang memengaruhi penerimaan masyarakat desa terhadap transformasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan mengenai *Sistem Informasi Pelayanan Publik di Desa Berbasis Website*, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan website merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kajian ini menemukan bahwa terdapat empat hal pokok yang menjadi temuan utama.

Pertama, pengembangan sistem informasi pelayanan publik berbasis website mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan dengan memangkas prosedur yang berbelit serta mempercepat akses masyarakat terhadap informasi publik. Kedua, website desa memiliki peran penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, karena setiap informasi terkait kebijakan, keuangan, dan program desa dapat dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Ketiga, pemanfaatan website desa menjadi sarana strategis dalam memperluas akses informasi masyarakat, khususnya dalam konteks keterbukaan data dan partisipasi publik yang lebih luas. Keempat, digitalisasi pelayanan publik melalui website desa merupakan bagian integral dari upaya transformasi digital desa, yang berkontribusi pada terwujudnya *good governance* di tingkat lokal.

Novelty dari kajian ini terletak pada pendekatan komprehensif terhadap literatur yang menghubungkan sistem informasi berbasis website dengan urgensi transformasi digital di desa. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek teknis pembangunan website, maka kajian ini menekankan keterkaitan website desa dengan transparansi, partisipasi publik, dan pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa sistem informasi pelayanan publik berbasis website bukan hanya sebagai instrumen teknis digitalisasi, tetapi juga sebagai strategi pembangunan desa yang adaptif terhadap era teknologi informasi. Ke depan, penelitian empiris berbasis studi kasus di berbagai desa diperlukan untuk memperkuat temuan literatur ini, sehingga implementasi sistem informasi dapat semakin efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Astuti, D., & Nugroho, A. (2020). Digitalisasi Layanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 112–124.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, D., & Saputra, A. (2020). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa melalui Sistem Informasi*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 101-115.
- Indrajit, R. E. (2016). *Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kemendagri. (2021). *Pedoman Pengelolaan Website Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- Kementerian Kominfo RI. (2021). *Pedoman Transformasi Digital Desa Menuju Smart Village*. Jakarta: Kominfo.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Ningsih, F., & Fajri, R. (2021). *Resistensi Masyarakat Desa terhadap Layanan Publik Digital*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 88–97.
- Nugroho, H., & Suyatno, S. (2021). Smart Village: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 145–158.
- Nurdin, A. (2021). *Tantangan Implementasi Website Desa dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Teknologi Informasi*, 9(1), 55-64.
- Prasetyo, A. (2020). *Digital Divide dalam Pelayanan Publik di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 21–35.
- Puspitasari, I. (2022). *Efektivitas Website Desa dalam Meningkatkan Layanan Administrasi Publik*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 15(3), 221-234.
- Ramadhan, F., & Nugroho, Y. (2021). *Peran Website Desa dalam Transparansi dan Partisipasi Masyarakat*. *Jurnal Informatika dan Sistem*, 12(1), 77-89.
- Ramli, R. (2020). *Evaluasi Pemanfaatan Website Desa sebagai Media Informasi Publik*. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 18(1), 1–12.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Sari, M. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Website Desa sebagai Media Informasi Publik*. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 19(2), 233–247.
- Setiawan, R. (2020). *Literasi Digital dan Tantangan Smart Village di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 145–160.
- Susanto, E. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Era Digital: Peluang dan Tantangan Demokrasi Lokal*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 23(1), 45–59.

- Susilo, H. (2020). *Keamanan Data dalam Implementasi E-Government di Desa*. Jurnal Teknologi Informasi, 15(3), 144–156.
- Sutanta, E. (2019). Literasi Digital Aparatur Desa dalam Pengelolaan Sistem Informasi Desa. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(1), 23–34.
- Sutanta, E. (2019). *Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk Transparansi dan Akuntabilitas*. Jurnal Teknologi Informasi, 5(2), 33-42.
- Widodo, T. (2019). *Kualitas SDM dan Keberhasilan Implementasi Teknologi Informasi di Pemerintahan Lokal*. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 99–110.